



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA

BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, tertib administrasi perkara, kualitas pelayanan publik satuan kerja di lingkungan peradilan umum kepada masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan penilaian Lomba pada seluruh satuan kerja dibawahnya dengan Surat Nomor 76/DJU/HM02.3/1/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Hal Pengumuman Lomba bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022, yang terdiri atas penilaian terhadap :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara;
- Keterbukaan Informasi Publik;
- Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
- Pemilihan Role Model;
- Pelaksanaan E-Litigasi;
- Pelaksanaan Layanan Hukum;
- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Evaluasi Implementasi SIPP (EIS); dan
- Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan berita acara Tim Penilai Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 pada pengadilan melalui tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua) telah ditetapkan pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan hasil penilaian tersebut dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Surat...



9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
11. Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 76/DJU/HM02.3/1/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Hal Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 62/DJU/SK/HM02.3/4/2022 Tanggal 11 April 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Bagi Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022;
13. Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 725/DJU/HM02.3/7/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Hal Pengumuman Tahap II Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022.

M E M U T U S K A N...



Balai
Sertifikasi
Elektronik

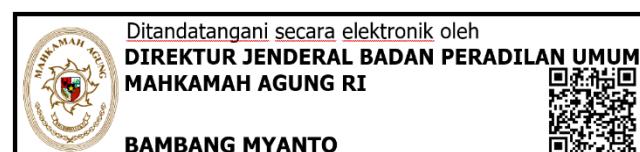
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan hasil Penilaian Tim Penilai Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Tembusan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang Non Yudisial.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
5. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
6. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Umum
 Nomor : 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022
 Tanggal : 9 Desember 2022

I. PEMENANG LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
TAHUN 2022
KATEGORI TERBAIK

A. PENGADILAN TINGGI

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	96,25
PERINGKAT II	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	95
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	90
HARAPAN I	PENGADILAN TINGGI RIAU	88,75
HARAPAN II	PENGADILAN TINGGI PADANG	88,5
HARAPAN III	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	86

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	95,25
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	94,75
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	80
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	78
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	76,5
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI BEKASI	75

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	95,25
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI JEMBER	95
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	91
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI PADANG	90,25
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	87,5
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	83,5

-  Balai Sertifikasi Elektronik
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI MUNGKID	96
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SAMPIT	95,25
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	94,75
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI KEPLANJEN	94
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	94
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI WATES	88,5
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	88,5
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU	84,75
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	84,75

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	90,5
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI MAGETAN	90,25
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI TANJUNG	87,25
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI MARISA	86,75
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI WONOSARI	85,5
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	85

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

PEMENANG LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

TAHUN 2022

KATEGORI TERFAVORIT

A. PENGADILAN TINGGI

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PERINGKAT II	:	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PERINGKAT III	:	PENGADILAN TINGGI MATARAM

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI JEMBER
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI BENGKULU

D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI MAROS
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI SUMBER

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI MARISA
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI POLEWALI
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI PRAYA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

II. PEMENANG LOMBA
PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM PRODEO
TAHUN 2022

A. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	75
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	75
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	62,5
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	56,25
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI BEKASI	50
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	50

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI MALANG	93,75
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	87,5
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	87,5
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	75
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI CILACAP	62,5

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	89,58
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI DEPOK	75
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	56,25

D. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	87,5
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	83,33
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	81,25

HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI BONTANG	75
HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	75
HARAPAN II	:	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	74
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	73

III. PEMENANG LOMBA
PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM POSBAKUM
TAHUN 2022

A. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	88,88
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	80,55
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	75
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI BEKASI	75
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	75
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	66,66
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	50

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI GRESIK	91,66
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	88,88
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI MATARAM	88,88
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI PADANG	86,1
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	83,33
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG	83,33
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	80,55
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	80,55

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	94,44
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI MAROS	88,88
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	86,1
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	86,1
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU	83,33
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI SUMBER	80,55

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	77,77
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI CURUP	77,77
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI SUBANG	77,77

D. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI BATULICIN	94,44
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI BANTAENG	92,58
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	89
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI SINTANG	87,96
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI SUKADANA	83,33
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	80,55



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

IV. PEMENANG LOMBA
PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM
SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN
TAHUN 2022

A. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS DAN KELAS I A

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI MATARAM	89,31
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI KUPANG	82,17
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI AMBON	75
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	75
HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	67,83
HARAPAN II	:	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	64,31
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI CILACAP	57,16

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI SUBANG	92,89
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI POSO	89,31
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI RABA BIMA	75
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	75
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	75
HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI BLORA	71,5
HARAPAN II	:	PENGADILAN NEGERI SELONG	57,16
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	55,93
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI STABAT	55,93

C. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	96,46
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI BONTANG	95,46
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI LUWUK	94,46
HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	92,89
HARAPAN II	:	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	89,31
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI BUOL	82,17
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	82,17

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



V. PEMENANG LOMBA
PELAKSANAAN E-LITIGASI PENGADILAN NEGERI
TAHUN 2022

A. Kategori E-Litigasi 5 s.d. 50 perkara

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI SERUI
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI SABANG
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
HARAPAN II	:	PENGADILAN NEGERI MAJENE
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI SANGGAU

B. Kategori E-Litigasi lebih dari 51 Perkara

PERINGKAT		NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	:	PENGADILAN NEGERI BANGKO
PERINGKAT II	:	PENGADILAN NEGERI GORONTALO
PERINGKAT III	:	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
HARAPAN I	:	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
HARAPAN II	:	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
HARAPAN III	:	PENGADILAN NEGERI MAMUJU



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

VI. PEMENANG LOMBA
PELAKSANAAN E-LITIGASI
HAKIM
TAHUN 2022

A. Kategori E-Litigasi 5 s.d. 14 Perkara

PERINGKAT		NAMA HAKIM
PERINGKAT I	:	NORMAN MAHAPUTRA, S.H.
PERINGKAT II	:	YANTI SURYANI, SH, MH
PERINGKAT III	:	SIGIT HARTONO, S.H.
HARAPAN I	:	RAHADIAN NUR, S.H., M.H.
HARAPAN II	:	JAMUJI, SH.
HARAPAN III	:	DESAK MADE WINDA RIYANTHI,S.H., MH

B. Kategori E-Litigasi 15 s.d. 99 Perkara

PERINGKAT		NAMA HAKIM
PERINGKAT I	:	DINI NUSRUDINIAH ARIFIN, S.H.
PERINGKAT II	:	DR. SAYED FAUZAN, S.H., M.H.
PERINGKAT III	:	DENIHENDRA ST PANDUKO, S.H., M.H.
HARAPAN I	:	AMIR EL HAFIDH, S.H.
HARAPAN II	:	DANIEL ELISA SETIAWAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
HARAPAN III	:	ZUHAIRI, S.H., M.H.

C. Kategori E-Litigasi 100 Perkara Ke Atas

PERINGKAT		NAMA HAKIM
PERINGKAT I	:	LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.HUM.
PERINGKAT II	:	TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.
PERINGKAT III	:	ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H.,M.H
HARAPAN I	:	ANDI HENDRAWAN, SH. MH
HARAPAN II	:	RADEN AYU RIZKIYATI, SH
HARAPAN III	:	MOHAMMAD SYAFII, S.H.



VII. PEMENANG LOMBA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

A. PENGADILAN TINGGI

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	77.11
PERINGKAT II	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	76.43
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	75.46
HARAPAN I	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	73.20
HARAPAN II	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	70.27
HARAPAN III	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	54.4

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	82.57
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	81.39
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	77.40
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	69.24
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	68.66
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	60.25

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	77.60
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI JAMBI	75.89
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	75.85
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	75.70
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	75.6
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	74.26



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI MAROS	78.65
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	77.98
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI WATES	75.30
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	72.70
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	72.39
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI TONDANO	72.65

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI MENTOK	83.76
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	81.90
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	76.85
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	74.60
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI BANGLI	74.45
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	73.35



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

VIII. PEMENANG LOMBA
ADMINISTRASI PERKARA DAN KEUANGAN PERKARA
TAHUN 2022

A. PENGADILAN TINGGI

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	82,95
PERINGKAT II	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	82,88
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	76,4
HARAPAN I	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	74,6
HARAPAN II	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	74,25
HARAPAN III	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	61,75

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	87,25
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	86,57
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	84,83
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	72,98
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	59
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	48,75

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	87,92
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	85,26
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	84,53
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI MATARAM	82,58
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI MALANG	79,75
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI PATI	76,5



D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	88,05
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	85,05
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI BANTUL	84,92
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI POSO	84,6
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI PALOPO	84,5
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI CURUP	84,15

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	86,63
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	84,84
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	81,2
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI DOMPU	80,25
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	80,18
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	78,13

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

**IX. PEMENANG LOMBA
ROLE MODEL TERBAIK**
TAHUN 2022

A. PENGADILAN TINGGI

NAMA HAKIM	JABATAN PENGUSULAN
DR. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

NAMA HAKIM	JABATAN PENGUSULAN
NURULI MAHDILIS, S.H.,M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

NAMA HAKIM	JABATAN PENGUSULAN
MUHAMMAD BUCHARY KURNIATA TAMPUBOLON, S.H.,M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI

D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

NAMA HAKIM	JABATAN PENGUSULAN
DARMINTO HUTASOIT, S.H.,M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

NAMA HAKIM	JABATAN PENGUSULAN
KHUSNUL KHATIMAH, S.H.,M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI PARE-PARE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

X. ASESSOR TERBAIK PADA PENGADILAN TINGGI
TAHUN 2022

No.	NAMA HAKIM	JABATAN PENGUSULAN
1	DR. TUMPAL NAPITUPULU, S.H.,M.HUM.	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MANADO
2	H. DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H.	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI DENPASAR
3	HARINI, S.H.,M.H.	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
4	ANNASTACIA TYAS ENDAH ETTY NURAENY, S.H.	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
5	SUPRABOWO, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
6	SUGIYANTO, SH. M.HUM	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

XI. PEMENANG LOMBA
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2022

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
PERINGKAT I	PENGADILAN TINGGI RIAU	80,30 (AA)
PERINGKAT II	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	79,30 (BB)
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	78,65 (BB)

**XII. PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TERBAIK
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
TAHUN 2022**

A. PENGADILAN TINGGI

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI	PREDIKAT
PERINGKAT I	PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONTE	818	A
PERINGKAT II	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	813	A
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	810	A
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	810	A
PERINGKAT III	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	810	A
HARAPAN I	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	809	A
HARAPAN II	PENGADILAN TINGGI RIAU	802	A
HARAPAN III	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	797	A

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI	PREDIKAT
PERINGKAT I	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	733	A
PERINGKAT II	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	725	A
PERINGKAT III	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	720	A
HARAPAN I	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	718	A
HARAPAN II	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	709	A
HARAPAN III	PENGADILAN NEGERI MEDAN	705	A



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI	PREDIKAT
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	735	A
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI MALANG	735	A
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	735	A
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	734	A
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU	734	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI MATARAM	733	A
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI BOGOR	732	A
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI TEGAL	732	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI DENPASAR	730	A
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI BENGKULU	729	A

D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI	PREDIKAT
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI WATES	745	A
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI KOLAKA	735	A
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	735	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI BANTUL	732	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	732	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	732	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI SAMPIT	732	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI MAROS	732	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	732	A
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI KALIANDA	731	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI BANGKO	730	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	730	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI KEDIRI	730	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI KEPAJEN	730	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	730	A
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	729	A



E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI	PREDIKAT
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI TANJUNG	733	A
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SUKADANA	730	A
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SINTANG	730	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	729	A
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI MARISA	729	A
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI KOTABARU	728	A
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	728	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI RAHA	727	A
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI OELAMASI	727	A
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI BARABAI	726	A
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	726	A
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI NEGARA	726	A



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

XIII. PEMENANG LOMBA
PELAKSANAAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP (EIS)
TAHUN 2022

A. PENGADILAN TINGGI

Kategori di atas 1.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PERINGKAT II	: PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PERINGKAT III	: PENGADILAN TINGGI MEDAN

Kategori 300 s.d 1.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PERINGKAT II	: PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PERINGKAT III	: PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Kategori 1 s.d 300 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PERINGKAT II	: PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PERINGKAT III	: PENGADILAN TINGGI BENGKULU

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS

PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI BEKASI
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A

Kategori di atas 2000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI MALANG
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI BLITAR
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI TANJUNGPONOROGO
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Kategori 1.001 s.d 2.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI MATARAM
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI BENGKULU
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI SLEMAN
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI PALU

Kategori 1 s.d 1.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI KLATEN
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI KENDARI
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI SRAGEN
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI DUMAI
HARAPAN III	: PENGADILAN PANGKALPINANG



D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B

Kategori 1.001 s.d 2.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI KISARAN
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SAMPIT
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI BANGIL
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI TUBAN
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI BATURAJA
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI JOMBANG

Kategori 501 s.d 1.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI KRAKSAN
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI KALIANDA
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI SORONG
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

Kategori 1 s.d 500 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI KOLAKA
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI BAU-BAU



E. PENGADILAN NEGERI KELAS II

Kategori 501 s.d 1.000 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI NEGARA
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI PRAYA
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Kategori 1 s.d 500 Perkara	
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN
PERINGKAT I	: PENGADILAN NEGERI TANJUNG
PERINGKAT II	: PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
PERINGKAT III	: PENGADILAN NEGERI NABIRE
HARAPAN I	: PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
HARAPAN II	: PENGADILAN NEGERI PASURUAN
HARAPAN III	: PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

XIV. PENERAPAN APLIKASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022

NO	NAMA PENGADILAN	KLASIFIKASI	KRITERIA	NAMA APLIKASI
1	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	Layanan Pengadilan	Applikasi	E-Peduli
2	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Layanan Penyumpahan Advokat	Applikasi	Sistem Informasi Administrasi Layanan (SI - ALay)
3	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Layanan Informasi dan Antrian Pengadilan	Applikasi	RelayOn
4	PENGADILAN NEGERI MATARAM	Layanan Pengadilan (Salinan Putusan)	Applikasi dan Layanan	Puspapos
5	PENGADILAN NEGERI KLATEN	Layanan Informasi	PTSP Online	ODS - Online Direct Service
6	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	Layanan Pengadilan	Applikasi	E-SuKa Highlight
7	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	Layanan Pengadilan	Applikasi	APLIKASI PTSP ONLINE
8	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	Layanan Dukcapil	Applikasi	Digital Perdata Permohonan Saprahan
9	PENGADILAN NEGERI KOBA	Pengembalian Sisa Panjar	Applikasi	Aplikasi Aksi Sijaka

